

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel ekonomi, demografi dan sektor pertanian terhadap indeks ketahanan pangan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Indonesia merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi secara kompleks oleh faktor ekonomi, demografi, dan kinerja sektor pertanian. Berdasarkan hasil analisis berikut merupakan kesimpulan dari penelitian ini:

1. Pengaruh variabel ekonomi terhadap indeks ketahanan pangan di Indonesia menunjukkan bahwa, PDRB per kapita terbukti berpengaruh positif signifikan, mengonfirmasi bahwa peningkatan kemampuan ekonomi regional dapat memperkuat akses masyarakat terhadap pangan berkualitas. Inflasi harga pangan memberikan dampak negatif yang signifikan, memvalidasi kerangka konseptual ketahanan pangan FAO bahwa stabilitas harga merupakan syarat mendasar akses pangan. Sebaliknya, nilai tukar petani tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan, mengindikasikan belum mampu mencerminkan kesejahteraan petani dalam sistem ketahanan pangan nasional. Hal ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan harga pokok penjualan yang diterima petani untuk melindungi pendapatan petani dan sebagai jaring pengaman harga.

2. Pengaruh variabel demografi terhadap indeks ketahanan pangan di Indonesia menunjukkan bahwa, jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan nasional, sehingga teori Malthusian tidak terbukti dalam konteks Indonesia. Sebaliknya, kemiskinan terbukti berdampak negatif signifikan dengan elastisitas tertinggi, menegaskan bahwa keterbatasan daya beli menjadi penghalang utama akses pangan. Hasil ini sejalan dengan kerangka FAO dan teori *entitlement* Amartya Sen yang menekankan pentingnya strategi pengurangan kemiskinan sebagai solusi struktural ketahanan pangan.
3. Pengaruh variabel sektor pertanian terhadap indeks ketahanan pangan di Indonesia menunjukkan bahwa, produksi beras dan jagung justru berpengaruh negatif signifikan terhadap ketahanan pangan, menandakan bahwa peningkatan produksi tanpa distribusi yang merata belum mampu memperkuat ketahanan nasional. Kondisi ini menekankan pentingnya kebijakan distribusi pangan yang efisien serta mekanisme pasar yang melindungi petani. Sejalan dengan kerangka FAO, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan, tetapi juga memerlukan integrasi dimensi akses, pemanfaatan, dan stabilitas.
4. Secara bersama-sama, pengaruh variabel ekonomi, demografi, dan sektor pertanian menjelaskan sebagian besar variasi ketahanan pangan, sehingga ketahanan pangan bersifat multidimensi. Temuan ini menegaskan bahwa pencapaian ketahanan pangan berkelanjutan memerlukan pendekatan dengan menyinergikan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan,

dan optimalisasi sistem pangan nasional dengan pangan yang berkualitas serta memenuhi aspek gizi dan nutrisi.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memperluas literatur ketahanan pangan dengan membuktikan relevansi kerangka FAO pada konteks Indonesia. Temuan negatif produksi beras dan jagung memperkuat hipotesis Prebisch-Singer mengenai penurunan nilai tukar komoditas primer. Hasil penelitian menegaskan bahwa ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga perlu integrasi teori pertumbuhan ekonomi dengan dimensi akses dan stabilitas pangan. Teori *entitlement* terbukti valid karena kemiskinan menjadi faktor utama. Temuan ini juga menunjukkan bahwa tekanan demografis tidak otomatis berdampak negatif jika pengelolaan sumber daya efektif.

2. Implikasi Praktis

Pemerintah perlu memprioritaskan pengentasan kemiskinan melalui implementasi program bantuan sosial yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan. Program bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan meliputi pengembangan ekowisata, pertanian organik, pembentukan koperasi dan BUMDes untuk mengelola potensi lokal, pelatihan dan pengembangan

keterampilan, serta program literasi keuangan dan transformasi digital untuk meningkatkan kapasitas masyarakat secara mandiri.

Pemerintah perlu mengembangkan indikator kesejahteraan petani yang lebih komprehensif daripada Nilai Tukar Petani, seperti Indeks Kesejahteraan Bersih Petani yang mencakup pendapatan bersih, konsumsi pangan bergizi, dan kemampuan investasi petani. Indeks ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan subsidi input, program perlindungan sosial, dan perencanaan intervensi berbasis rumah tangga.

Dengan bonus demografi, pemerintah dapat mengintegrasikan ketahanan pangan dengan penciptaan lapangan kerja produktif, pertanian di perkotaan dengan hidroponik, serta pengembangan agroindustri lokal yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ketersediaan pangan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan mengenai agroindustri berskala nasional maupun internasional.

Pemerintah perlu mempertimbangkan pembangunan pusat pangan regional yang mengintegrasikan produksi, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi pangan, sehingga disparitas pasokan antarwilayah berkurang dan kehilangan pascapanen dapat ditekan serta mengurangi ketergantungan impor komoditas primer.

Secara keseluruhan, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi dan indikator makro. Ketahanan pangan juga mempertimbangkan kesejahteraan riil petani sebagai produsen, pemanfaatan penduduk sebagai aset produktif, serta tata kelola distribusi yang efisien. Penelitian ini memberikan

alternatif arah kebijakan baru yang lebih logis, operasional, dan sesuai dengan konteks pembangunan ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan. Keterbatasan ini dapat diperbaiki oleh peneliti selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data menggunakan 34 provinsi sebelum pemekaran 38 provinsi, sehingga 4 provinsi hasil pemekaran belum tersedia pada batas tahun 2023 mengingat data yang digunakan dalam kurun waktu 2018-2023. Selain itu, diduga terdapat variabel lain yang berpengaruh terhadap Indeks Ketahanan Pangan seperti perubahan iklim, kualitas infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan yang berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan data tidak tersedia secara agregat.